DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986)

Arifin, Firmansyah, *et.al*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 2005)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011)

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa Jakarta, 2003)

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010)

Gunawan A Tauda*, Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012)

Gustav Radbruch Terjemahan Sidharta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, New York, 1973).

Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama Bandung 2006).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta: Sinar Grafika 2016)

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Kelik Iswandi, *et.al*, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

M. Arsyad Sanusi, T*eknologi Informasi & Hukum E-commerce*, (Jakarta: PT. Dian Ariesta, 2004)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002).

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2009).

Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012).

Mustafa Luthfi, *et.al*, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014).

Nanik Prasetyoningsih, *et.al*, *Menagih Komitmen Pemerintah Mewujudkan Keadilan Sosial, Proceedings Seminar Nasional dan Call for Papers, Lembaga Penelitian*, (Yogyakarta: Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hal. 264.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005)

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2008).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987)

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 1999).

Salim HS, *et.al*, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010)

Wahyudi Djafar, *et.al*, *Perlindungan Data Pribadi - Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2019.)

_____, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen Seri Internet dan HAM*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2019).

_____, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2014)

Journal International/Jurnal Nasional:

Ayu, Miranda Risang, "Kedudukan Komisi Independen sebagai state auxilary institution dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. I, 2009, DOI: 10.12160/j.konstitusi.2009.01.001

Bruce Ackerman, "The American System: A New Framework for Political Analysis", Yale Law Journal, 1988, DOI: 10.2307/791396

Darmini Roza, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", Lex Jurnalica Vol. 18, 2021, DOI: 10.25173/lexjurnalica.v18n1p1.

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, "Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan", Jakarta, 2008.

Efi Yulistyowati, *et.al*, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580,

Gunawan A. Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." Pranata Hukum, vol. 6, 2011, DOI: 10.25173/pranatahukum.v6n2p39.

Handryas Prasetyo Utomo, et.al, "Urgensi Pelindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vo. 8, No.2, 2020, DOI: 10.31765/ji.v8n2.2020.1443

Hendra Nurtjahjo, "Lembaga Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35, 2005, DOI: 10.24129/jhumpem.v35i2.161.

Kelik Iswandi, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 No. 2, 2020, DOI: 10.18196/jphk.1208.

Mohammad Fajrul Falaakh, "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Laporan Penelitian, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, DOI: 10.21319/wcruthn.v1i1.3

Nanik Prasetyoningsih, *et.all*, "Menagih Komitmen Pemerintah Mewujudkan Keadilan Sosial, Proceedings Seminar Nasional dan Call for Papers, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, DOI: 10.25825/lp3m.v6i2.2018.34.

Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia". Jurnal Media Hukum, Vol. 21, 2014DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190.

Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, 2016, DOI: 10.25825/jnh.v7i2.2016.148

OECD, "Creating a Culture of Independence: Practical Guidance against Undue Influence, The Governance of Regulators", OECD Publishing, Paris, 2017 DOI: 10.1787/9789264286335-en.

Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Teori The New Separation OF Power Bruce Ackerman", Journal of Indonesian Law, Vol. 2, 2021, DOI: 10.25825/jil.v33i2.2019.

Satriawan, I., & Mokhtar, K. A, "The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State Organs", Hasanuddin Law Review, Vol. 5, No. 2, 2019, https://doi.org/10.20956/halr ev.v5i2.1669.

SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan kekuasaan Dan Otoritas", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 1966.

Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara, Pasca Amandemen UUD 1945", MMH Jurnal, Vol. 43, 2014, DOI: 10.25825/mmhjurnal.v43i2. 2014.
Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, Vol. 4, 2016, DOI: 10.25825/jselat.v4i1.2016.
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264196391-en.

Hasil Penelitian:

Evy Trisulo, "Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
Rizkia Nurdinisari, "Pelindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan". Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
Muhammad Insan C. Pratama, "Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract". Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Journal International/Jurnal Nasional:

Indonesia, Undang-Undang Dasaar Negara Republik Indonesia
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945.
Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi Negara dengan/antar lembaga tertinggi negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Nomor 20 Tahun 2016.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
the General Data Protection Regulation (GDPR), 2016
United Nations, Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990
Japan Act on the Protection of Personal Information (APPI), Act No. 57 of 2003
South Korea Personal Information Protection Act (PIPA), Act No. 10309 of 2011
Singapore Personal Data Protection Act (PDPA), Act No. 26 of 2012.

Hong Kong Personal Data (Privacy) Ordinance (PDPO) Cap. 486

Artikel:

Alga Soraja, Pelindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM, Artikel Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Vol.1, 2021.

APEC Privacy Framework 2015, August 2017, Reports, CTI Sub-Fora & Industry Dialogues Groups, Digital Economy Steering Group (DESG).

House of Commons, Culture, Media and Sport Committee, Appointment of the Information Commissioner, Second Report of Session 2015–16, 2016, https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmselect/cmcmsct/1344/134402.htm, diakses pada 10 April 2023.

Hukum Online, *Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan negara Lain*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?page=1, pada 10 September 2023.

Hukumonline, Menyorot Independensi Lembaga Pengawas Data Pribadi, https://www.hukumonline.com/berita/a/menyorot-independensi-lembaga-pengawas-data-pribadi-lt6461f9e088aeb/?page=1.

Kemdikbud, Sebuah Pengantar Metode Kualitatif, Jakarta, 2014, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553960/mod_resource/content/1/materi%20metode%20Kualitatif%20teoriiI.pdf.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=658:dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945&catid=100&Itemid=180&lang=en

Website/ Internet:

CNBC Indonesia, "Instagram & Tiktok Minggir, Ini Raja Platform Sosial Media RI". https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220612115314-37-346302/instagram-tiktok-minggir-ini-raja-platform-sosial-media-ri, diakses pada 20 Juni 2023.

Australian Government - Department of Home Affairs, "Freedom of information". https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/freedom-of-information, diakses pada 14 September 2023.

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2021-2023". https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html, diakses pada 22 November 2023.

CNN Indonesia, "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-

499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual, diakses pada 21 September 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Otoritas Independen Syarat Mutlak Lindungi Data Pribadi Warga". https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33932/t/Otoritas+Independen+Syarat+Mutlak+Lindun, diakses pada 24 November 2023.
Encyclopaedia Britannica, "technology". https://www.britannica.com/technology/technology, diakses pada 10 September 2023.
European Commision, "What are Data Protection Authorities (DPAs)". https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en, diakses pada pada 24 September 2023,
Forbers, Conor Murray, U.S. Data Privacy Protection Laws: A Comprehensive Guide, 2023, diakses pada 14 September 2023, 10:41, https://www.forbes.com/sites/conormurray/2023/04/21/us-data-privacy-protection-laws-a-comprehensive-guide.
GDPR EU, What is GDPR, the EU's new data protection law?, https://gdpr.eu/what-is-gdpr/, 20 Agustus 2023.
GoodStats, "Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia". https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.
Human Rights Watch, "Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa". https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.
IMDA Singapore, "About the Personal Data Protection Commission (PDPC)". https://www.imda.gov.sg/about-imda/data-protection/personal-data-protection, diakses pada 3 Maret 2023.
Kemdikbud, "Sebuah Pengantar Metode Kualitatif. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553960/mod_resource/content/1/materi%20metode%20Kualitatif%20teoriiI.pdf, diakses pada 19 September 2023.
Kominfo, "Teguh Amanat UU Presiden tetapkan Lembaga Otoritas PDP". https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/, diakses pada 2 Februari 2023.
Kompasid, "Kewenangan Otoritas Pengawas Data Pribadi Tetap Perlu Diperkuat". https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/25/kewenangan-otoritas-pengawas-data-pribadi-tetap-perlu-diperkuat?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login, diakses pada 24 November 2023.
Ministry of Communication and Information, "MCI's response to PQ on public agencies' exemption from PDPA". https://www.mci.gov.sg/media-centre/parliamentary-questions/pq-on-public-agencies-exemption-from-pdpa/, diakses pada 18 Maret 2023.

Mukhlis, "Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus Dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945", https://media.neliti.com/media/publications/25267-ID-kewenangan-lembaga-lembaga-negara-dalam-memutus-dan-menafsirkan-uud-setelah-aman.p, diakses pada 5 Mei 2023.

CNBC Indonesia, "Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget". https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget, diakses pada 10 September 2023.

Personal Information Protection Commission JAPAN, "Roles and Responsibilities" https://www.ppc.go.jp/en/aboutus/roles/, diakses pada 19 Oktober 2023

PKN, "Pelindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban", https:// bpkn.go.id/posts/show/id/159, diakses pada 31 Oktober 2023

Prof. Dr. Hendri Subiakto, S.H., M.A., "Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya". https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf, diakses pada 19 Agustus 2023.

Sonia Cissé, "France-Data Protection Overview, Guidance Note". https://www.dataguidance.com/notes/france-data-protection-overview, diakses pada 1 Desember 2023.